

REVITALISASI KELEMBAGAAN PROGRAM KB SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

INSTITUTIONAL REVITALISATION OF FAMILY PLANNING PROGRAM AN EFFORT TO CONTROL THE POPULATION GROWTH RATE

S. Budi Prasetyo dan Arif Sofianto

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah
email: budisendikho@yahoo.com

ABSTRACT

One of the main critical issues in a decentralized development today is the failure of family planning programs that are affected by its institutional forms. This study aims to develop a formula institutional revitalization of family planning program managers are required at this time. The method used in this research is descriptive qualitative models using Spradley's analytical techniques. This research was conducted in Pekalongan Municipal, Wonosobo Regency, and Purworejo Regency. The conclusion of this study is that the deterioration of family planning programs in the area due to lack of commitment from local leaders, organizations do not focus in carrying out its functions, especially the field staff (field officers), lack of resources and synergies in the implementation of the program. Chief policy areas are very influential in determining the shape of the organization, resource allocation and implementation of synergies. Institutional revitalization needs to be done by the local government is established agencies that focus on population and family planning affairs so that the implementation in the field (field officers) are more focused on family planning matters, but on the other hand still have to pay attention to the ability of the region and some other matters. In addition to the organization in the form of focus, also need to be supported adequacy of resource allocation and increased synergy among sectors fostered by regional heads.

Keywords : revitalization, institutional, family planning

PENDAHULUAN

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia selama satu dekade terakhir mengalami peningkatan cukup tinggi. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49% per tahun, hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan penduduk kurang terkendali. Penduduk Indonesia selama 10 tahun terakhir bertambah sebanyak 32,5 juta jiwa (Buletin Kencana, 2012). Berbagai pihak menilai bahwa fenomena ini terjadi selain karena pengaruh perubahan sosial,

ekonomi dan politik, juga diakibatkan oleh kontrol yang lemah terhadap program KB secara nasional sampai tingkat daerah. Semenjak reformasi bergulir, perhatian terhadap masalah kependudukan sangat kurang, termasuk program KB.

Meskipun dari segi substansi program KB masih tetap dijalankan di daerah, namun secara nasional program KB dinilai gagal dan tidak menjadi lebih efektif (<http://www.antaranews.com> “Menkes: program KB gagal”), Persoalan terjadi pada kebijakan, struktur kewenangan dan alokasi sumberdaya.

Setelah dihilangkannya kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di daerah, urusan KB diserahkan sepenuhnya pada daerah dan tidak semua daerah memiliki kelembagaan yang khusus menangani KB. Masing-masing daerah menempatkan urusan KB di satuan kerja yang berbeda-beda.

Jawa Tengah merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia, setelah Jawa Timur dan Jawa Barat, sebesar 14 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Menurut hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk di Jawa Tengah sebanyak 32.380.687 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,37% (terendah di Indonesia) dan angka *Total Fertility Rate* (TFR) tahun 2007 di kisaran 2,3 (Kencana Edisi 21 Tahun VII 2012). TFR Jawa Tengah adalah 2,3 namun di tahun 2012 berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) angka tersebut meningkat menjadi 2,5, sementara tingkat nasional sebesar 2,6. Hal tersebut berarti bahwa terdapat penurunan kinerja program KB di Jawa Tengah meskipun masih sedikit di atas rata-rata nasional. Dibutuhkan kerja keras untuk mencapai target MDG's yaitu sebesar 2,1 pada tahun 2015 (BKKBN Jateng, <http://jateng.bkkbn.go.id>, Senin, 18 Februari 2013).

Kerja tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh para pelaksana program KB di daerah yang memerlukan dukungan kebijakan, struktur dan sumberdaya dari pimpinan daerah serta kesadaran masyarakat. Program KB dipengaruhi oleh kebijakan dan sumberdaya dialokasikan. Pelaksanaan program KB pasca-reformasi mengalami kemunduran karena berbagai faktor mulai dari politis sampai operasional. Kebijakan dan kelembagaan serta alokasi sumberdaya mempengaruhi keberhasilan di masing-masing daerah.

Sesuai dengan kondisi sebagaimana dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini ialah membangun formula kelembagaan pelaksana program KB yang dibutuhkan di Jawa Tengah saat ini

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dilakukan di 3 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang dipilih berdasarkan format kelembagaan KB. Kabupaten Wonosobo merupakan daerah yang memiliki format kelembagaan khusus pada KB. Kota Pekalongan merupakan daerah yang mewakili pelembagaan urusan KB digabung dengan banyak urusan lain. Kabupaten Purworejo merupakan wilayah yang mewakili penggabungan urusan KB dengan Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana kebanyakan daerah lain.

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah pengelola program KB (SKPD pelaksana program KB), institusi pemerintah daerah yang terkait, serta para pegiat KB (PLKB, PPKBD, Sub PPKBD). Informan ditentukan berdasarkan pertimbangan penguasaan masalah sesuai dengan kebutuhan data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari diskusi, wawancara dan isian kuesioner dari para informan yang berisi tentang pendapat dan pemahaman mengenai kelembagaan pelaksana program KB. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah panduan wawancara, panduan diskusi dan daftar pertanyaan terbuka. Informan tertentu diwawancara secara mendalam dan sebagian yang lain diminta mengisi daftar pertanyaan terbuka yang disediakan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Spradley seperti yang dikutip Sugiyono (2009). Analisis model Spradley merupakan kesatuan proses linear yang dimulai dari

analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema budaya. Analisis domian adalah tahap awal dengan memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Analisis Taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Analisis Komponensial ialah mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan mengkontraskan antarelemen. Analisis Tema Budaya adalah upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukan benang merah tersebut, maka selanjutnya akan dapat disusun konstruksi bangunan situasi sosial/objek penelitian secara komprehensif.

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Secara umum, kinerja program KB di Kota Pekalongan dari segi pencapaian kuantitas, angka TFR sebesar 2,8, lebih tinggi dari Jawa Tengah yang hanya 2,5. Hal tersebut disebabkan karena pemahaman tradisi, budaya dan religiusitas yang kuat sehingga kadang memandang bahwa KB itu kurang baik. Peserta KB aktif sebanyak 34.757 PUS yang terbagi menjadi 69,16% mandiri dan melalui program pemerintah sebesar 30,84%. Terdapat sebanyak 22,57% PUS bukan peserta KB.

Kabupaten Wonosobo merupakan satu-satunya daerah di Jawa Tengah yang memiliki satuan kerja khusus menangani KB, yaitu Badan Keluarga Berencana. Namun problemnya anggaran untuk kader masyarakat terbatas. Mulai tahun 2014 KB akan ditambah alokasi anggaran dan kegiatannya karena disadari bahwa persoalan kependudukan kedepan perlu mendapatkan perhatian serius. Pelaksanaan program KB di Kabupaten Wonosobo cendrung lebih baik dengan capaian TFR

tahun 2012 sebesar 1,99 sedangkan tahun 2011 sebesar 2,2. untuk angka DO sebesar 17,3 dan *Unmet need* 9,39.

Kondisi pelaksanaan program KB di Kabupaten Purworejo terbilang kurang dibanding daerah lain dengan capaian angka *Total Fertility Rate* (TFR) sebesar 2,6 sedangkan rata-rata Jawa Tengah 2,5. Secara umum pencapaian KB tergolong rendah tetapi angka pertumbuhan penduduk justru -0,25, hal ini dikarenakan tingginya migrasi ke luar daerah untuk mencari pekerjaan.

B. Persoalan Program KB

Persoalan-peroalan program KB dapat dibedakan menjadi aspek kebijakan, kelembagaan, sumberdaya, partisipasi, sinergi dan kinerja. Persoalan-persoalan tersebut saling terkait dan menjadi kunci keberhasilan program KB.

Keberhasilan program KB di daerah saat ini tidak dipungkiri sangat dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan daerah. Persoalan kebijakan program KB secara umum adalah tidak adanya jaminan untuk mengarusutamakan KB di daerah. KB adalah kebijakan jangka panjang, namun dengan skema politik 5 tahunan, kebijakan kepala daerah terkesan jangka pendek dan cuci tangan.

Persoalan kelembagaan adalah belum idealnya bentuk lembaga serta kewenangan yang dimiliki. Sebagian besar informan menyatakan bahwa memang bentuk lembaga sangat mempengaruhi kinerja atau keberhasilan program KB. Sebagain infroman menyatakan bahwa bentuk kelembagaan KB di daerah mereka kurang sesuai, di Kabupaten Wonosobo paling banyak yang menyatakan sesuai karena fokus pada KB, sedangkan di Kota Pekalongan dan Kabupaten Purworejo mereka yang menyatakan kurang setuju lebih banyak. Ketika ditanyakan mengenai konsep lembaga seperti apa sebaiknya untuk KB ke depan, sebagian besar

menyatakan lebih baik fokus terhadap urusan KB saja.

Persoalan sumberdaya sebagian besar informan menyatakan bahwa sumberdaya memberikan pengaruh sangat penting pada keberhasilan program KB. Berdasarkan pengalaman di lapangan, mereka memandang sumberdaya merupakan aspek sangat penting dalam meningkatkan kinerja program KB. Mereka juga menyatakan bahwa sumberdaya yang ada telah dimanfaatkan secara tepat untuk pengelolaan program KB yang dibutuhkan. Rata-rata sebesar 51,7% informan menyatakan sangat setuju terhadap hal ini.

Terkait persoalan partisipasi masyarakat, mayoritas informan sangat setuju bahwa partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan program KB. Selama ini kerja-kerja KB di tingkat bawah memang dilakukan oleh masyarakat melalui kader-kader seperti PPKBD, Sub PPKBD dan PKB RT, hanya saja dukungan terhadap kader-kader masyarakat sangat kurang.

Persoalan koordinasi di semua daerah hampir sama, yaitu masih kurang komunikasi antar pelaku. Masing-masing SKPD meskipun memiliki keterkaitan dalam keberhasilan KB, namun tidak bekerjasama dan masing-masing memiliki agenda terpisah. Sebagaimana yang terjadi pada koordinasi, aspek sinergi juga menghadapi persoalan yang sama, yaitu komitmen dari para pejabat daerah, ego sektoral dan persoalan teknis administratif lainnya.

Persoalan yang sama juga dihadapi dalam hal kemitraan, hampir di semua daerah menghadapi persoalan komitmen antar pelaku untuk bekerjasama, masing-masing instansi hanya mementingkan urusan sendiri. Kemitraan paling tinggi ada di Kabupaten Wonosobo, di dua daerah

lain kemitraan dianggap kurang begitu terjalin.

Dengan kondisi demikian, sebagian besar orang mengusulkan agar konsep pelaksanaan program KB sebagai mengadopsi Orde Baru namun juga mengikuti perkembangan kini pada masa otonomi daerah. Dalam hal kebijakan, perlu mencontoh apa yang dilakukan Orde Baru dimana menempatkan KB sebagai program penting yang didukung oleh segenap unsur, ada koordinasi, sinergi dan kerjasama yang erat. Dukungan sumberdaya juga perlu mengacu pada apa yang dialokasikan Orde Baru. Namun pada sisi kelembagaan, juga tidak serta merta meneruskan Orde Baru, karena sekarang masa otonomi daerah maka konsepnya tetap menggunakan otonomi daerah.

C. Analisis Kelembagaan dan Kinerja Program KB

Berdasarkan analisis kelembagaan dan kinerja, maka dapat ditarik garis linear bahwa semakin lembaga fokus maka alokasi sumberdaya akan semakin baik dan berimbang pada kinerja. Sebagaimana dijelaskan bahwa lembaga fokus seperti Badan KB Kabupaten Wonosobo akan berpengaruh pada kinerja PLKB yang lebih fokus, sementara di Kabupaten Purworejo PLKB menangani 3 urusan (KB, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak) dan Kota Pekalongan PLKB menangani 4 urusan (pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak dan KB). Dengan skema beban kerja tersebut, capaian TFR Kabupaten Wonosobo paling baik yaitu 1,99, Kabupaten Purworejo sebesar 2,6 dan Kota Pekalongan tertinggi sebesar 2,8. Oleh karena itu, lembaga yang fokus akan menghasilkan kinerja yang lebih fokus juga.

Tabel 1. Perbandingan Kelembagaan dan Kinerja KB di Lokasi Penelitian

Kota Pekalongan	Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Purworejo
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Badan KB	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
1 UPT utk 4 kecamatan	1 UPT tiap kecamatan	1 UPT tiap kecamatan
1 PLKB 2 kelurahan	1 PLKB 4 -5 desa/kel	1 PLKB 6 desa/kel
Kader PPKBD, Sub PPKBD	Kader PPKBD, Sub PPKBD	Kader PPKBD, Sub PPKBD
tidak ada rakordes	rakordees numpang	rakordes numpang
•TFR 2,8 •22,57% PUS bukan peserta KB	•TFR 1,99 •DO 17,3 •Unmet need 9,39	•TFR 2,6 •Peserta KB 5 tahun terakhir terus meningkat

Sumber: Data Penelitian 2013

Temuan di atas memberikan pemahaman bahwa kelembagaan merupakan unsur yang sangat penting dalam menunjang fokus kinerja, sekaligus perlunya dukungan sumberdaya yang memadai. Selanjutnya analisis kondisi di atas menjadi bahan bagi perumusan konsep atau model formulasi revitalisasi kelembagaan secara menyeluruh, mulai dari perumusan kebijakan, penentuan bentuk organisasi, alokasi sumberdaya, penggalangan partisipasi serta sinergi bagi peningkatan kinerja KB.

D. Format Revitalisasi Kelembagaan Pelaksana KB

Berdasarkan penggalian data di lapangan, ditemukan bahwa komitmen pimpinan daerah dalam program KB merupakan aspek yang sangat mempengaruhi keberhasilan program KB. Alokasi sumberdaya yang memadai, dukungan terhadap kampanye dan sinergi pada berbagai institusi daerah yang terkait merupakan peran kepala daerah yang sangat dibutuhkan untuk keberhasilan program KB. Pemerintah daerah perlu menciptakan situasi dimana KB menjadi pokok bahasan penting, baik di masyarakat

maupun dunia pendidikan melalui kampanye dan kurikulum.

Menurut informan, lembaga KB yang ideal adalah lebih fokus pada urusan KB dan kependudukan sehingga kienrjanya lebih efisien dan efektif. Akan tetapi berdasarkan temuan lapangan, bahwa urusan lembaga yang lebih fokus pada KB dan kependudukan saja belum menjamin kienrja yang baik jika unsur lainnya seperti SDM, anggaran dan kapasitas pengelolannya tidak juga ditingkatkan. Oleh sebab itu revitalisasi kelembagaan yang fokus pada KB perlu dibarengi dengan alokasi sumberdaya yang memadai.

Pengalaman di beberapa daerah bahwa ketika lenbaga KB digabung dan menangani banyak urusan, biasanya urusan KB tidak fokus. Urusan mana yang diutamakan tergantung dari pimpinan atau kepala, berasal dari unsur apa, misalnya ketika KB digabung dengan pemberdayaan masyarakat, jika kepala berasal dari pemberdayaan masyarakat, maka akan lebih fokus urusan tersebut.

Pada tenaga lapangan ditemukan bahwa ketika lembaga KB digabung dengan urusan lain, PLKB juga mengurusi

urusan lainnya sehingga tidak fokus terhadap KB. Hal ini ditemukan di Kota Pekalongan dan Kabupaten Purworejo, dimana mereka selain penyuluhan juga menangani fungsi lain yang menjadi tupoksi lembaga, atau bahkan diminta camat membantu tugasnya.

Secara ideal lembaga KB sebaiknya berdiri sendiri pada urusan KB, sehingga lebih fokus, petugas di lapangan juga lebih fokus KB. Kebanyakan responden juga menyatakan mereka ingin kembali menjadi lembaga seperti masa Orde Baru, dimana struktur vertikal dan urusan fokus, namun sebagian menyatakan bahwa era sekarang otonomi daerah, sehingga tidak bisa kembali lagi seperti masa Orde Baru, namun konsep lain yang substansinya sama fokusnya tetapi secara struktur mencerminkan otonomi daerah.

Demikian juga masalah sumberdaya KB, pada masa ini menjadi isu utama di banyak daerah, dimana masa otonomi daerah sumberdaya dari pemerintah daerah dianggap kurang diperhatikan. Penyediaan SDM, anggaran maupun sarana prasarana kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pada penyediaan SDM, di banyak daerah terjadi kelangkaan atau kekurangan PLKB, dimana hampir semua daerah belum memenuhi target 1 desa 1 PLKB, bahkan ada dimana 1 orang PLKB mengampu 6 - 9 desa. Kemampuan SDM KB juga masih perlu peningkatan dimana banyak yang melihat teknik-teknik penyuluhan kini perlu diperbaiki sesuai dengan perkembangan, maka kemampuan penyuluhan perlu ditingkatkan.

Dalam sisi anggaran, di semua daerah alokasi anggaran masih minim. Di kebanyakan daerah, komposisi anggaran program KB terbesar justru berasal dari pemerintah pusat (BKKBN Provinsi), dana daerah hanya menjadi pendamping saja. Kondisi ini merupakan situasi yang meyakinkan bahwa memang KB masih

menjadi urusan sampingan di daerah dan sumberdaya masih tergantung dari pusat. Dalam pemenuhan sarana dan prasarana, meskipun beberapa orang menganggap ada peningkatan terkait teknologi yang digunakan, namun beberapa pihak menyatakan masih belum mencukupi kebutuhan masa kini.

Partisipasi masyarakat di beberapa daerah sebenarnya sudah cukup baik, bahkan ada sebagian masyarakat yang bersedia swadaya terlibat dalam program KB seperti di Kabupaten Purworejo. Namun pada kasus lain, partisipasi menjadi semakin menurun karena menurunnya dukungan terhadap mereka, misalnya dukungan operasional untuk Sub PPKBD dan PKB RT sudah tidak ada sehingga kinerjanya kurang optimal. Pada beberapa kasus, lembaga masyarakat lain seperti PKK atau ormas juga masih terlibat dalam program KB, hanya saja persoalannya belum ada upaya sistematis untuk menjalin partisipasi ini. Di beberapa daerah partisipasi masyarakat dalam mengikuti program KB juga terhambat masalah biaya, banyak dari mereka kesulitan masalah biaya KB, terutama MKJP, di sisi lain program KB gratis masih terbatas.

Untuk persoalan sinergi, hampir di semua daerah sinergi menjadi persoalan yang kurang mendapatkan perhatian, dimana kebanyakan institusi yang memiliki keterkaitan dengan KB kurang memperhatikan sinergisitas kinerja antar institusi. Masing-masing institusi masih terlalu memikirkan ego sektoral, mementingkan urusan sendiri meskipun dalam rangkian kinerja yang tujuannya sama. Di kebanyakan wilayah juga tidak adanya sinergi antara penyuluhan dan penjaringan akspetor dengan pelayanan KB. Dalam hal ini Badan KB mengurus penyuluhan dan penjaringan akseptor, di sisi lain pelayanan oleh Dinas Kesehatan kurang sinkron dengan kinerja Badan KB tersebut. Selain itu, sinergi antar instansi

lain seperti dengan Polri, TNI dan sebagainya di setiap wilayah kurang berjalan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka ada beberapa aspek penting untuk melakukan revitalisasi kelembagaan yang dapat dirumuskan adalah:

- Revitalisasi kelembagaan KB di daerah merupakan langkah penting yang perlu dilakukan sesuai dengan implementasi UU 52/2009 dengan bentuk BKKBD atau lembaga lain yang lebih fokus pada KB sehingga PLKB lebih fokus kinerjanya. Revitalisasi kelembagaan hendaknya menjadikan PLKB lebih fokus hanya pada tugas KB saja. Revitalisasi kelembagaan perlu didukung dengan revitalisasi pada aspek sumberdaya, partisipasi masyarakat dan sinergisitas. Akan tetapi kadang terdapat kendala teknis maupun politis. Persoalan kemampuan daerah dan regulasi lainnya serta kepentingan politik kadang masih membatasi revitalisasi kelembagaan KB, sehingga perlu dilakukan langkah koordinasi dan sosialisasi yang intensif antara Kepala Daerah, DPRD serta Pemerintah Provinsi.
- Revitalisasi sumberdaya perlu memperhatikan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan sumberdaya. Di beberapa daerah, upaya revitalisasi sumberdaya justru perlu dilakukan melalui efisiensi tenaga dan sumberdaya yang ada. Seperti di Kota Pekalongan dan Kabupaten Purworejo dimana PLKB menangani banyak fungsi, maka revitalisasi dilakukan dengan memfokuskan tugas pada KB saja. Dalam persoalan anggaran, revitalisasi terkait banyak aspek dan ini terkait dengan kebijakan dan komitmen pimpinan daerah. Maka secara internal, revitalisasi dilakukan dengan evaluasi terhadap arah alokasi kegiatan, efisiensi tenaga dan sumberdaya anggaran serta sarana untuk lebih fokus pada KB saja.
- Revitalisasi partisipasi masyarakat dilakukan melalui efektivitas sasaran program KB, lebih banyak difokuskan pada pelayanan (gratis) bukan untuk program-program yang outputnya bukan pelayanan. Di sisi lain, menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama KB dan perlu menjaga keberlanjutan kelembagaan di masyarakat, menjaga kelompok-kelompok KB dan kader masyarakat.
- Revitalisasi sinergisitas dimulai dari puncak pimpinan daerah untuk mensinergikan antar institusi. Dalam rangka sinergi koordinasi dengan institusi lain, diperlukan aktifasi kembali kegiatan koordinasi, perlu alokasi sumberdaya atau mendorong beberapa pihak mengoptimalkan sumberdayanya untuk berkoordinasi.

Dengan demikian, dapat dirumuskan formula langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan revitalisasi kelembagaan yang dapat dirumuskan adalah:

- Lembaga KB dan pegiat KB di daerah harus mampu memberikan penjelasan kepada pimpinan daerah yang berisi masalah-masalah strategis terkait kependudukan dan KB dalam keberhasilan pembangunan serta perlunya memberikan perhatian yang lebih serius terhadap permasalahan tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan dokumen rencana kerja atau *roadmap* yang mampu memberikan penjelasan secara tuntas.
- Lembaga KB mampu menjelaskan pengalaman selama ini terkait kendala-kendala lembaga yang tidak fokus dan tugas PLKB yang berat telah menurunkan kinerja KB. Penjelasan ini

- dapat disampaikan melalui berbagai sarana seperti kajian, laporan atau naskah akademis. Dalam kesempatan tersebut lembaga pelaksana KB perlu mendorong implementasi UU 52/2009 dengan bentuk BKKBD atau lembaga lain yang lebih fokus pada KB. Dengan perubahan tersebut maka PLKB akan lebih fokus kinerjanya. Namun jika pada kenyataan cukup sulit mewujudkan lembaga KB yang hanya fokus pada Kependudukan dan KB, maka toleransi dapat dilakukan dengan menggabungkan KB dengan urusan pemberdayaan perempuan. Perubahan kelembagaan hendaknya menjadikan PLKB lebih fokus hanya pada tugas KB saja dibanding sebelumnya. Langkah perubahan kelembagaan juga memerlukan pendekatan politis terhadap pimpinan daerah baik eksekutif maupun legislatif sebagai aktor kunci penentu kebijakan.
- Meningkatkan alokasi Sumberdaya, berupa penambahan jumlah PLKB, meningkatkan dukungan terhadap kader masyarakat. Lembaga pelaksana KB mengusulkan skema penambahan dukungan sumberdaya dan meningkatkan efektifitas alokasi sumberdaya. Skema peningkatan jumlah PLKB dilakukan dengan mengusulkan perekutan tenaga baru atau memberikan kesempatan kepada PNS yang ada untuk menjadi PLKB, tentunya dengan komitmen terpenuhinya kebutuhan mereka. Namun demikian disadari bahwa langkah penambahan jumlah PNS tergantung dari kebijakan pemerintah pusat, dan membuka kesempatan PNS yang ada untuk menjadi PLKB juga tidak mudah. Oleh sebab itu skema meningkatkan kinerja kader masyarakat (PPKBD dan Sub PPKBD) menjadi salahsatu solusinya. Untuk melakukan hal tersebut, maka

dibutuhkan komitmen dukungan sumberdaya yang memadai, baik kualitas melalui pelatihan dan pembinaan maupun operasional mereka.

- Lembaga KB mampu meyakinkan pimpinan daerah membangun komitmen antar SKPD, memperkuat sinergi pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Membangun komitmen ini dapat dilakukan oleh pimpinan (kepala daerah atau wakil kepala daerah) yang diharapkan dapat turun langsung mengkoordinir SKPD untuk mengikis ego sektoral. Lembaga pelaksana KB meyakinkan pimpinan daerah untuk turun langsung mengkoordinir agenda keberhasilan KB dengan dukungan semua SKPD terkait.
- Membangun komitmen dengan stakeholder lainnya, dalam hal ini organisasi masyarakat, TNI, Polri dan dunia usaha. Langkah ini juga perlu mendapatkan dukungan dan perhatian dari pimpinan daerah. Demikian juga aparatur di bawahnya seperti camat dan lurah sangat diharapkan perannya dalam mengkoordinir aparat yang ada di wilayahnya untuk bersinergi dalam pelaksanaan program KB.

Pada prinsipnya upaya revitalisasi kelembagaan merupakan langkah strategis yang membutuhkan komitmen dari pimpinan. Lembaga KB harus mampu menjelaskan arti strategis dari urusan kependudukan dan KB dalam keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan-temuan penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Format kelembagaan pelaksana program KB di Jawa Tengah saat ini masih bervariasi berdasarkan kemampuan,

kebutuhan dan prioritas daerah, yang ditentukan oleh orientasi kepala daerah, namun sebagian besar menggunakan PP No. 38 Tahun 2007 dan PP No. 41 Tahun 2007 sebagai pedoman umum penetapan format kelembagaan.

2. Kendala terkait kelembagaan pengelola KB dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah pada tataran kebijakan dimana daerah belum memiliki komitmen mengarusutamakan KB, kurangnya dukungan agenda program dan kegiatan, kurang fokus dalam hal alokasi sumberdaya. Pada tingkatan lapangan, tenaga di lapangan menjadi tidak fokus karena dibebani berbagai urusan selain KB, lebih banyak tugas-tugas administratif, sehingga kinerja mereka kurang optimal. Sinergi antar SKPD terkait juga sangat lemah, tidak ada lagi koordinasi antar pimpinan wilayah dan kurangnya kerjasama dengan lembaga terkait menyebabkan program KB menjadi lemah.
3. Formula revitalisasi kelembagaan pelaksana program KB yang dibutuhkan di Jawa Tengah saat ini adalah menjadikan lembaga sampai pada tingkat pelaksanaan di lapangan (PLKB) lebih fokus pada KB, di sisi lain bentuk kelembagaan juga masih harus tetap memperhatikan kemampuan daerah dan beberapa urusan lain. Fokusnya adalah bagaimana mendinamisir lembaga KB, mengoptimalkan fungsi dengan memfokuskan kinerja PLKB hanya pada KB serta memberikan dukungan dan perhatian lebih kepada kader desa (PPKBD dan Sub PPKBD), membangun jejaring yang lebih kuat sehingga dengan sumberdaya yang ada

fungsi menjadi optimal. Bentuk organisasi memang sebaiknya fokus pada KB namun perlu didukung ketercukupan alokasi sumberdaya.

B. Saran (Rekomendasi)

Berdasarkan simpulan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Lembaga KB dan pegiat KB menyarankan kepada kepala daerah untuk mengoptimalkan dukungan kelembagaan dan program KB melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah.
2. Lembaga KB dan pegiat KB mendorong Kepala Daerah meningkatkan sinergi antar aktor yang terkait pelaksanaan program KB, baik antar SKPD maupun dengan lembaga terkait seperti Polri, TNI dan lembaga lainnya. Langkah ini harus dilakukan oleh pimpinan daerah dalam mensinergikan antar SKPD maupun menjalin kerjasama dengan instansi lain. Bentuk kegiatan seperti Rakor pengendalian penduduk dan Rakordes perlu diaktifkan kembali.
3. Bentuk ideal kelembagaan KB adalah Lembaga KB yang fokus mengurus Kependudukan dan KB. Dengan demikian penyuluhan KB di lapangan lebih fokus pada tugas fungsi sesuai dengan ketentuan jabatan fungsional (PLKB) tidak lagi diberi pekerjaan yang tidak berkaitan dengan penyuluhan KB. Selain itu pelayanan kader masyarakat perlu diperhatikan, mensinergikan dengan gerakan pemberdayaan perempuan/PKK merupakan langkah yang sangat penting,. Oleh sebab itu perlu dibangun kesepahaman dengan pelaku di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung

Jurnal & Bulletin

Buletin Kencana, Edisi 21 Tahun VII, Januari – Maret 2012, BKKBN Provinsi Jawa Tengah

Buletin Warta Keluarga Berencana, No. 3 Tribulan III Tahun 2012, BKKBN Provinsi Jawa Tengah

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Pekalongan Tahun 2011, Bappeda Kota Pekalongan & Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan

Dokumen Hukum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang RPJMD Jawa Tengah 2008 -2013

Website

Lestari Oerip DS, Dra, M.Si , 2012, Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (yang) Setengah Hati, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jawa Tengah, <http://www.pkbijateng.or.id>

<http://www.antaranews.com> Menkes: program KB gagal, Selasa, 9 April 2013 12:54 WIB